



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln Raya Watu Klotok Tojan, Klungkung Telp. (0366) 21087

**RENJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2017**

**KLUNGKUNG
2017**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Renja Perubahan Dishub Tahun 2017 Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishub di tahun 2017 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2013-2018.

Renja Perubahan SKPD Dishub Kabupaten Klungkung tahun 2017 merupakan rencana kinerja pada anggaran Perubahan Tahun 2017 yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kabupaten Klungkung 2013-2018. Renja Perubahan SKPD Dishub menggambarkan target kinerja tahun 2017 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra Dishub Kabupaten Klungkung dimana sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Perubahan SKPD Dishub ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung ini.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung.
Drs. I Nyomen Sucitra
Pembina Utama Muda (III/c)
NIP. 19621231199003 1 147



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Permasalahan dan Pelayanan SKPD	12
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	16
3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD	16
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD	18
BAB IV PENUTUP	25



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh komponen SKPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkannya dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan (Renstra SKPD) yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan (Renja SKPD)

Dishub Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishub selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renja Dishub 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Renja ini telah dijalankan hingga triwulan ke-2. Pada tahun 2017 telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil Renja tahun 2017 yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan sasaran Renstra SKPD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017.

Dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Diantaranya menyatakan bahwa Perubahan Renja SKPD tahun dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Renja Perubahan SKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan evaluasi Renja SKPD Dishub tahun 2017 pada Triwulan I dan II, terdapat perkembangan program dan kegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal Renja SKPD



Dishub disusun, meliputi penyesuaian masalah pembangunan, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya perubahan Renja SKPD Dishub tahun 2017.

Renja SKPD tahun 2017 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra SKPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan
- b. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/ kegiatan SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra Dishub Kabupaten Klungkung.
- d. Menjadi instrumen dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P.
- e. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3)



19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

- Menyediakan acuan resmi bagi SKPD Dishub dalam rangka menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Tahun 2017
- Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishub Kabupaten Klungkung.
- Sebagai pedoman target yang ingin dicapai di Tahun 2017 serta dana yang dibutuhkan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja SKPD Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Permasalahan Pelayanan SKPD

Bab III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

- 3.1. Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan prioritas SKPD

Bab IV. PENUTUP



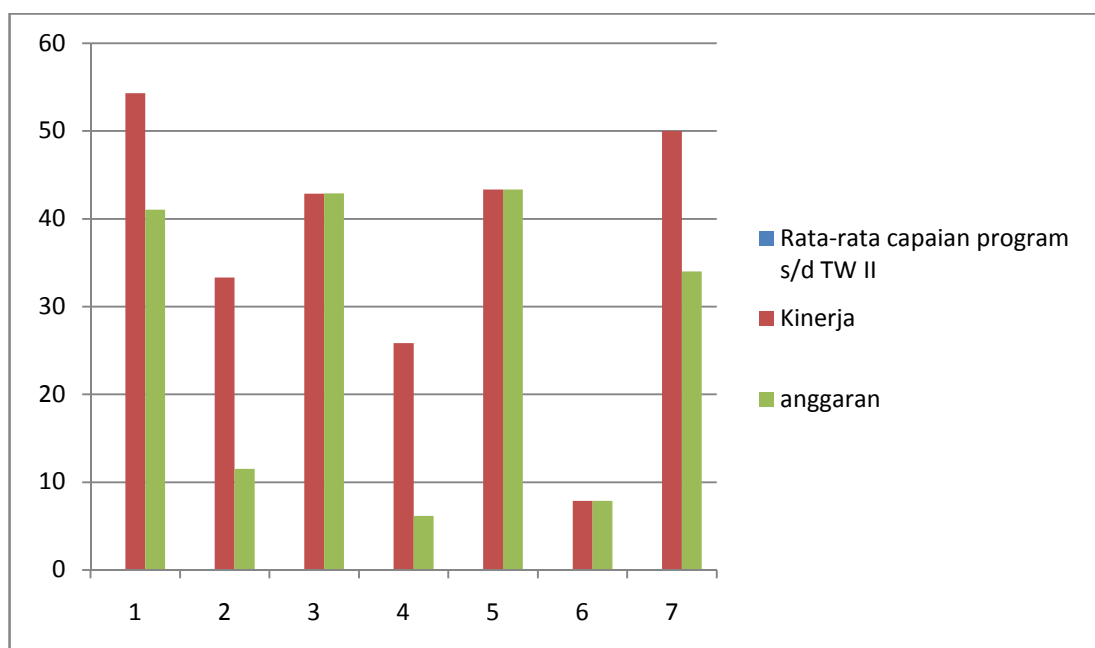
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja pada Bidang urusan perhubungan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dimana terdapat 10 program dan 27 kegiatan.

Bidang Urusan Perhubungan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja per akhir triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 43,15 persen.”
- Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan dan urusan Perhubungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.841.017.954,- atau sebesar 28,84 persen dengan predikat “SR.” dari total anggaran sebesar Rp 20.250.398.351,-





Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishub dan
Pencapaian Renstra SKPD Dishub s/d Tahun 2017 (Triwulan II)
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun lalu		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II tahun berjalan						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan						
							Target Renja SKPD tahun berjalan		Realisasi Renja SKPD Tahun berjalan (s/d Triwulan II)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Urusan Wajib																		
1 07	Bidang Urusan Perhubungan																		
1 07 01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %	100	%	7.358.547.782	88	2.556.761.023	100,00	1.687.274.257	39,63	668.658.410	40%	40%	100,00	1.687.274.257	75,78	4.912.693.690,00	0,76	67%
1 07 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	1.347.981.684	24	411.483.949	12	266.028.000	6	137.915.550	50%	52%	12	266.028.000	42,00	815.427.499,00	36,00	60%
1 07 01 07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)	60	Bulan	851.661.450	24	289.725.000	12	176.642.850	6	69.457.850	50%	39%	12	176.642.850	42,00	535.825.700,00	36,00	63%



1	07	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	% terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)	100	%	150.783.363	98	58.007.320	100,00	33.091.950	66,22	21.914.150	66%	66%	100	33.091.950	88,06	113.013.420,00	197,97	75%
1	07	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)	100	%	60.996.054	100	18.004.250	100,00	8.030.500	65	5.180.500	65%	65%	100	8.030.500	88,15	31.215.250,00	199,95	51%
1	07	01	13	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	% terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	209.256.881	99	359.951.300	100,00	189.410.043	58,04	109.941.000	58%	58%	100,00	189.410.043	85,66	659.302.343,00	198,94	315%
1	07	01	16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	60	Bulan	168.744.964	24	56.619.500	12	35.680.000	6	3.900.000	50%	11%	12	35.680.000	42,00	96.199.500,00	36,00	57%
1	07	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	51.710.197	24	14.032.000	12	17.120.000	6	3.840.000	50%	22%	12	17.120.000	42,00	34.992.000,00	36,00	68%
1	07	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	393.901.052	24	130.277.700	12	148.794.000	6	31.381.200	50%	21%	12	148.794.000	42,00	310.452.900,00	36,00	79%
1	07	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln)	60	Bulan	4.123.512.137	24	1.218.660.004	12	812.476.914	6	285.128.160	50%	35%	12	812.476.914	42,00	2.316.265.078,00	36,00	56%
1	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100	%	1.802.416.884	83	933.985.558	100,00	909.679.200	75	114.412.250	75%	13%	100,00	909.679.200	86,00	1.958.077.008,00	183,01	1.843.664.758
1	07	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan / unit		unit		9	160.492.500	0	0	-	-			-	-				



1	07	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60	Bulan	196.034.761	24	188.828.590	12	559.254.200	6	34.294.600	50%	6%	12	559.254.200	42,00	782.377.390,00	36,00	748.082.790
1	07	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)	60	Bulan	1.394.905.458	24	502.790.968	12	281.725.000	6	80.117.650	50%	28%	12	281.725.000	42,00	864.633.618,00	36,00	784.515.968
1	07	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60	Bulan	211.476.665	24	81.873.500	12	68.700.000	6	-	50%	0%	12	68.700.000	42,00	150.573.500,00	36,00	150.573.500
1	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai	100	%		66,7	95.750.000	0	-	-	-			0	-				
1	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian seragam yang diadakan / stel	288	stel	0	192	95.750.000	0	0	-	-			0	-				
1	07	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)	60	Bulan	40.646.215.204	24	17.900.603.548	12	10.705.198.206	6	3.798.176.717	50%	35%	12	10.705.198.206	42,00	32.403.978.471,00	36,00	28.605.801.754
1	07	17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir di Kab. Klungkung.100% (bln)	60	Bulan	290.043.540	24	87.171.800	12	68.644.800	6	29.860.800	50%	44%	12	68.644.800	42,00	185.677.400,00	36,00	155.816.600



1	07	17	02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya operasional rutin di UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln)	60	Bulan	422.794.659	24	204.773.350	12	116.931.750	6	46.224.000	50%	40%	12	116.931.750	42,00	367.929.100,00	36,00	321.705.100
1	07	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten setahun (92%)	60	Bulan	32.450.971.228	24	13.549.794.192	12	7.470.226.950	6	1.635.901.720	50%	22%	12	7.470.226.950	42,00	22.655.922.862,00	36,00	21.020.021.142
1	07	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	911.737.119	24	685.974.769	12	410.666.000	6	194.217.000	50%	47%	12	410.666.000	42,00	1.290.857.769,00	36,00	1.096.640.769
1	07	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayani angkutan umum di Kabupaten Klungkung terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	2.340.020.090	24	1.835.792.310	12	1.653.374.056	6	1.403.171.600	50%	85%	12	1.653.374.056	42,00	4.892.337.966,00	36,00	3.489.166.366
1	07	17	12	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida terpenuhi 100% (bln)	60	Bulan	4.017.730.413	24	1.446.243.877,00	12	934.789.250	6	482.956.397	50%	52%	12	934.789.250	42,00	2.863.989.524,00	36,00	2.381.033.127



1	07	17	14	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100%	4300	Org	212.918.155	1.600	90.853.250	800	50.565.400	0	5.845.200	0%	12%	800	50.565.400	#####	147.263.850,00	#####	141.418.650
1	07	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%	100	%	20.309.207.207	69	1.218.689.619	100,00	1.667.988.100	6,15	102.641.234	6%	6%	100,00	1.667.988.100	58,23	2.989.318.953,00	168,53	2.886.677.719
1	07	18	04	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berupa Gedung Terminal, Areal Parkir, Pos Jaga, Rumah Operator, Pagar keliling, Tangki BBM dan Penerangan Jalan (%)	100	%	20.309.207.207	66	1.218.689.619	100,00	1.667.988.100	6,15	102.641.234	6%	6%	100,00	1.667.988.100	57,47	2.989.318.953,00	166,26	2.886.677.719
1	07	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung	100	%	4.776.471.093	85	2.377.836.300	100,00	1.167.825.040	37,97	443.373.450	38%	38%	100,00	1.167.825.040	74,46	3.989.034.790,00	185,42	3.545.661.340
1	07	19	01	Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Persentase terpenuhinya Kebutuhan fasilitas lalu-lintas (rambu, Traffic Light, marka jalan, kereb dan Guardrail) (%)	100	%	4.019.476.153	86	2.083.739.360	100,00	942.011.640	34,57	325.695.600	35%	35%	100,00	942.011.640	73,55	3.351.446.600,00	186,08	3.025.751.000



1	07	19	04	Kegiatan Mengadakan Operasional Penerbitan Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)	100	%	756.994.940	80	294.096.940	100,00	225.813.400	52,11	117.677.850	52%	52%	100,00	225.813.400	77,41	637.588.190,00	180,11	519.910.340
1	07	20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)	100	%	8.387.317.051	69	432.927.200	100,00	2.422.909.400	0,14	117.965.300	0%	5%	100,00	2.422.909.400	56,30	2.973.801.900,00	168,76	2.855.836.600
1	07	20	02	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%)	100	%	8.086.450.900	75	242.581.500	100,00	2.251.852.500	4,57	102.893.800	5%	5%	100,00	2.251.852.500	59,74	2.597.327.800,00	174,66	2.494.434.000
1	07	20	03	Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kecamatan Nusa Penida setahun 2 kl (%)	100	%	300.866.151	96	133.220.000	100,00	94.334.000	2,39	2.252.500	2%	2%	100,00	94.334.000	66,08	229.806.500,00	195,85	227.554.000
1	07	20	04	Pendataan dan penerbitan bengkel kendaraan bermotor	Persentase terpenuhinya data dan penerbitan bengkel di Kabupaten Klungkung / %	100	%		100	57.125.700	100,00	76.722.900	16,71	12.819.000	17%	17%	100,00	76.722.900	72,24	146.667.600,00	200,00	133.848.600



Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor :
 - Penyedia Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi ada yang mengalami gagal tender
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui e-purchasing yang masih baru, dan masih mengalami penyesuaian pelaksanaannya.
 - Kendala yang terjadi dalam proses administrasi
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu dapat mempengaruhi pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan tahunan dalam Renstra
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi :
 - Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
 - Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan.
 - Melakukan proses pembelajaran dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.
 - Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan

2.2. Permasalahan Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishub Tahun 2017 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Urusan Perhubungan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S W O T

- **Analisis Lingkungan Internal**

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah Kabupaten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.



3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan. Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung meliputi :

- a. **Peluang (Opportunity)**

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan Segitiga emas/ Dermaga Gunksa;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;

- b. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan. **Ancaman (Treath)**

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;



2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
6. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
7. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Perubahan Target Kinerja Prioritas SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala (S.W.O.T) yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2017 telah tertuang dalam Dokumen Renstra tahun 2013–2018 yang berisi tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan selama lima tahun.

Dokumen Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta kegiatan Dishub Kabupaten Klungkung dipakai sebagai acuan atau panduan bagi seluruh Bidang di lingkup Dishub Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dishub untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klungkung sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dishub sebagai pegangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dishub Kabupaten Klungkung dalam setiap tahunnya.

Sesuai dengan pedoman yang berlaku, rumusan materi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung periode 2013 – 2018 meliputi Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan serta sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Visi dan Misi Kabupaten

Memasuki pembangunan Kabupaten Klungkung pada periode lima tahun (2013-2018), Kabupaten Klungkung sebagai salah satu pelaku pembangunan ingin mewujudkan pencapaian Misi **"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Klungkung pada periode 2013-2018. Rakyat Klungkung yang Unggul dan Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Klungkung.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Klungkung 2013-2018, melalui



penetapan Tujuan dan Sasaran kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Klungkung maka ditetapkan Misi Kabupaten Klungkung periode 2013 – 2018 yaitu :

- (1). Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
- (2). Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
- (3). Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (4). Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
- (5). Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6). Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good corporate governance*.
- (7). Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- (8). Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
- (9). Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
- (10). Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
- (11). Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung pada periode 2013-2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh pencapaian Misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Misi yang dilaksanakan oleh dinas Perhubungan yaitu Misi ke-8 yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Seimbang”** dengan terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.



3.2 Perubahan Program dan Kegiatan prioritas SKPD 2017

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishub mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Rincian program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.1. dan 3.2.

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2017

SASARAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
		Indikator/ Satuan	Rencana
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase rata - rata capaian output kegiatan (%)	95,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	12,00
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya Kebutuhan sesajen Kantor (bulan)	12,00
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan Prasarana Kantor (%)	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100,00
	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor (%)	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)	12,00
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik (bln)	12,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	12,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (%)	100,00
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100,00
	Program Peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (%)	100,00
	Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang terkirim tepat waktu (dok)	6,00
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (%)	100,00
	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (laporan/bln)	12,00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (%)	100,00
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan data angkutan dan sarana prasarana angkutan (%)	100,00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan Darat dan Laut yang Nyaman, aman, tertib dan lancar (bln)	12,00
	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan	Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum (%)	100,00
Kegiatan Peningkatan disiplin Masyarakat menggunakan	Cakupan pelaksanaan operasional bidang perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun (bln)	12,00	



SASARAN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
		Indikator/ Satuan	Rencana
	Angkutan		
	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan Penumpang	Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi dalam setahun (bln)	11,00
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan penertiban dan pengendalian Lalu-lintas dalam setahun (bln)	12,00
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Cakupan pemeliharaan dan operasional Terminal semarapura dalam setahun (bln)	12,00
	Kegiatan pengembangan Sarana Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Cakupan pemeliharaan dan operasional pelabuhan penyeberangan nusa penida dalam setahun (bln)	12,00
	Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan laut (%)	100,00
	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Cakupan penyuluhan siswa sekolah SMU di Kabupaten Klungkung (siswa)	800,00
	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyebrangan (%)	100,00
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan (%)	100,00
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya sarana Lalu-lintas dan Parkir	100,00
	Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (%)	100,00
	Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban Pengguna areal Parkir di Kabupaten Klungkung	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir dalam setahun (Bln)	12,00
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya pengujian kendaraan yang laik jalan di Kab. Klungkung	100,00
	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor	Persentase pemenuhan sarana pengujian Kendaraan bermotor (%)	100,00
	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kab. Klungkung (%)	100,00
	Kegiatan Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor		
	Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan	100,00
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Penerangan Jalan	Persentase pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun (%)	100,00



Tabel. 3.2.
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan
Pada APBD Induk Tahun 2017 dan Rencana Perubahan Tahun 2017

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDUK TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		CATATAN		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	URUSAN WAJIB			20.250.398.351,00		21.757.898.351,00			
2	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN			20.250.398.351,00		21.757.898.351,00			
2	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase rata - rata capaian output kegiatan (%)	95,00	433.339.000,00	95,00	410.075.000,00	
2	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	12,00	383.784.000,00	12,00	341.320.000,00
2	09	01	13	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	100,00	11.875.000,00	100,00	11.875.000,00
2	09	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya Kebutuhan sesajen Kantor (bulan)	12,00	37.680.000,00	12,00	56.880.000,00
2	09	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan Prasarana Kantor (%)	100,00	685.376.815,00	100,00	934.369.335,00
2	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100,00	24.000.000,00	100,00	132.000.000,00
2	09	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor (%)	100,00	65.590.488,00	100,00	118.845.256,00
2	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)	12,00	203.413.747,00	12,00	265.268.983,00
2	09	02	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik (bln)	12,00	340.072.580,00	12,00	373.455.096,00
2	09	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik baik (bln)	12,00	52.300.000,00	12,00	44.800.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDUK TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		CATATAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (%)	100,00	94.665.232,00	100,00	92.190.232,00	
2 09 03 09	Kegiatan Pelayana Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100,00	94.665.232,00	100,00	92.190.232,00	
2 09 08	Program Peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (%)	100,00	324.923.417,00	100,00	318.561.417,00	
2 09 08 01	Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang terkirim tepat waktu (dok)	6,00	105.060.416,00	6,00	95.893.416,00	
2 09 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (%)	100,00	209.412.500,00	100,00	212.217.500,00	
2 09 08 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (laporan/bln)	12,00	10.450.501,00	12,00	10.450.501,00	
2 09 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (%)	100,00	0	100,00	26.305.000,00	
2 09 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan data angkutan dan sarana prasarana angkutan (%)	100,00	0	100,00	26.305.000,00	Kegiatan baru di DPA Perubahan
2 09 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan Darat dan Laut yang Nyaman, aman, tertib dan lancar (bln)	12,00	9.863.629.837,00	12,00	10.600.171.916,00	
2 09 17 01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan	Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum (%)	100,00	95.950.032,00	100,00	831.339.032,00	
2 09 17 02	Kegiatan Peningkatan disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan	Cakupan pelaksanaan operasional bidang perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun (bln)	12,00	108.325.314,00	12,00	110.825.314,00	
2 09 17 04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna guna keselamatan Penumpang	Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi dalam setahun (bln)	11,00	7.630.161.703,00	11,00	7.610.679.700,00	
2 09 17 05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan penertiban dan pengendalian Lalu-lintas dalam setahun (bln)	12,00	413.217.000,00	12,00	418.242.000,00	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDUK TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		CATATAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 17 06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Cakupan pemeliharaan dan operasional Terminal semarapura dalam setahun (bln)	12,00	447.861.330,00	12,00	447.096.812,00	
2 09 17 12	Kegiatan pengembangan Sarana Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Cakupan pemeliharaan dan operasional pelabuhan penyeberangan nusa penida dalam setahun (bln)	12,00	947.949.342,00	12,00	957.449.342,00	
2 09 17 13	Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan laut (%)	100,00	92.175.000,00	100,00	92.349.600,00	
2 09 17 14	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Cakupan penyuluhan siswa sekolah SMU di Kabupaten Klungkung (siswa)	800,00	127.990.116,00	800,00	132.190.116,00	
2 09 18	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyebrangan (%)	100,00	1.343.940.550,00	100,00	1.954.120.550,00	
2 09 18 04	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan (%)	100,00	1.343.940.550,00	100,00	1.954.120.550,00	
2 09 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya sarana Lalu-lintas dan Parkir	100,00	1.541.623.116,00	100,00	1.744.628.516,00	
2 09 19 01	Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (%)	100,00	1.044.506.400,00	100,00	1.251.711.800,00	
2 09 19 04	Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban Pengguna areal Parkir di Kabupaten Klungkung	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir dalam setahun (Bln)	12,00	497.116.716,00	12,00	492.916.716,00	
2 09 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya pengujian kendaraan yang laik jalan di Kab. Klungkung	100,00	373.435.516,00	100,00	352.686.516,00	
2 09 20 02	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor	Persentase pemenuhan sarana pengujian Kendaraan bermotor (%)	100,00	251.546.516,00	100,00	257.102.516,00	
2 09 20 03	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kab. Klungkung (%)	100,00	95.584.000,00	100,00	95.584.000,00	
2 09 20 04	Kegiatan Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor			26.305.000,00		-	KEGIATAN DIBATALKAN



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDUK TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		CATATAN			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	09	21		Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan	100,00	5.589.464.868,00	100,00	5.324.789.869,00	
2	09	21	01	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Penerangan Jalan	Persentase pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun (%)	100,00	5.589.464.868,00	100,00	5.324.789.869,00	
				JUMLAH			20.250.398.351,00		21.757.898.351,00	



Perubahan Renja SKPD Dishub tahun 2017 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Kebutuhan pendanaan SKPD Dishub Kabupaten Klungkung pada Renja Perubahan Tahun 2017 bertambah sebesar Rp. 1.507.500.000,-. Anggaran di Induk Tahun 2017 sebesar Rp. 20.250.398.351,- sedangkan anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2017 menjadi Rp. 21.757.898.351,- atau naik sebesar 5,4 %.

Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2017 menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV PENUTUP

Dokumen Renja Perubahan SKPD Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Alokasi anggaran pada Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2017 semula sebesar Rp.20.250.398.351,- berubah menjadi Rp.21.757.898.351,- Terjadi penambahan sebesar Rp.1.507.500.000,- atau bertambah 7,44 %. Dengan tersusunnya Renja Perubahan SKPD Dishub Tahun 2017 termasuk kebutuhan pendanaannya maka dapat menjadi acuan resmi bagi SKPD Dishub dalam rangka menyusun Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2017 menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.